

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Laporan Keuangan**

##### **1. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan (*financial statement*) sebagai dokumen bisnis yang berfungsi untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai yang dapat meliputi manajer, investor, kreditor, dan agen regulator.<sup>1</sup> Para pemakai laporan keuangan tersebut menggunakan informasi yang dilaporkan untuk membuat berbagai keputusan. Laporan Keuangan menyediakan informasi yang berisi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Jadi laporan keuangan merupakan kumpulan data yang berisi informasi ringkas mengenai laporan dan kinerja keuangan suatu entitas yang digunakan para pemakainya dalam mengambil keputusan terkhusus keputusan ekonomi.

##### **2. Karakteristik Laporan Keuangan**

###### **a. Dapat dipahami**

Dapat dipahami berarti bahwa informasi akuntansi harus cukup transparan sehingga masuk akal bagi pemakai informasi. Kerangka kerja konseptual mengasumsikan bahwa pemakai harus

---

<sup>1</sup> Walter T. Harrison, *Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bisnis, akuntansi maupun aktivitas ekonomi.

b. Relevan

Data dikatakan relevan apabila mengandung informasi yang mengajikan perbedaan bagi pembuat keputusan, yang memiliki nilai prediktif atau umpan balik. Informasi mengenai transaksi dan peristiwa masa lalu yang disajikan dapat mempengaruhi secara langsung nilai prediktif dan nilai umpan balik informasi.

c. Andal

Informasi yang tidak dapat diandalkan jarang ada yang bermanfaat. Secara umum informasi, dikatakan andal ketika lengkap, bebas dari kesalahan atau bias yang material, terpercaya, dan dapat diharapkan untuk merepresentasikan secara wajar substansi ekonomi dari peristiwa atau transaksi yang mendasari.

d. Dapat dibandingkan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan identitas pelaporan lain pada umumnya. Untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangannya. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Perkembangan industri syariah mendorong IAI untuk menyusun PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, yang menjadi

landasan dalam membuat laporan keuangan, disahkan untuk menjadi Standar Akuntansi Keuangan pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).

## **B. Lembaga Amil Zakat**

### 1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil *Zakat* merupakan lembaga penyelenggaraan zakat yang seluruhnya dibangun atas ide masyarakat yang berkiprah di bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan kemashlahatan umat Islam.<sup>2</sup>

### 2. Manajemen Pengelolaan Zakat

Dalam mengelola zakat, sangat dekat keterkaitannya dengan sistem manajemen yang digunakan pada sebuah aksi penyelenggaraannya. Terdapat dua bentuk manajemen pada penyelenggaraan zakat, yaitu manajemen tradisional dan modern.<sup>3</sup>

## **C. Transparansi**

Menurut Prof. Sofyan Harahap, terdapat tiga faktor kunci untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, yaitu transparansi, budaya akuntabilitas, dan integritas manusia

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi yaitu prinsip yang

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada,2009)422

<sup>3</sup> Moh Toriquddin dkk, MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI YAYASAN ASH SHAHWAH (YASA)MALANG, jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 no.1 Juni 2013 hlm 29-41 <https://osf.io> diakses pada 13 april 2022

memberikan informasi keuangan yang sifatnya terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Transparansi adalah keterbukaan sungguh-sungguh dan menyeluruh mengenai informasi dalam proses pengelolaan sumber daya publik.<sup>5</sup> Transparansi merupakan sebuah pengawasan atas pertanggungjawaban pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola organisasi publik.

Transparansi memiliki beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Kemudahan pemahaman dan akses informasi.
2. Adanya informasi dan publikasi melalui media mengenai kegiatan dan keuangan.
3. Adanya informasi mengenai penggunaan sumber daya yang dapat diakses oleh publik.
4. Laporan Tahunan.
5. Organisasi memiliki media publikasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.<sup>6</sup>

#### **D. Akuntabilitas**

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005* (Bandung: Fokus Media, 2009), 23.

<sup>5</sup> Nico Andrianto, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang, Bayumedia Publishing: 2007), 20

<sup>6</sup> Julkarnain, "Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan", *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, No. 2, (September, 2018), 2

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari seluruh kegiatan dalam organisasi yang disajikan dalam bentuk pelaporan keuangan kepada pihak-pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah guna mencapai visi organisasi tertentu.<sup>7</sup> Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pengelolaan suatu kegiatan secara cermat dan tepat kepada pemberi tanggung jawab.<sup>8</sup> Akuntabilitas sebagai sikap pertanggungjawaban oleh seseorang atau kelompok sebagai pemegang kendali pengelolaan zakat kepada pihak eksternal (*muzakki*).<sup>9</sup> Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan yang sering digunakan dengan menggunakan sinonim dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik.<sup>10</sup>

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini adalah lembaga zakat kepada pemberi amanah (Donatur).<sup>11</sup> Selain itu, akuntabilitas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan organisasi dan segala aktivitas yang dituangkan dalam bentuk informasi dan pelaporan oleh pihak yang diberikan

---

<sup>7</sup> Nurhayati Fadhillah dan Oktaroza, “Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Barat, *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung*, 2014 ISSN 2089-3590.

<sup>8</sup> Ibid, 27

<sup>9</sup> Agustinawati, V. & Mawardi, Memaknai “Amanah” Atas Praktik Akuntabilitas pada Organisasi Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* Vol. 16(2), 2018.

<sup>10</sup> Djalil, R, *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2014), 63.

<sup>11</sup> Nahdliatul Amalia, T. W, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada Laz Surabaya), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 9, 2019, 1756.

tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan dalam periode tertentu.<sup>12</sup>

### 1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan pengungkapan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas:

- a. Integritas Kuangan, artinya laporan menampilkan laporan keuangan mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan. Digunakan untuk mengukur sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah.
- b. Pengungkapan, hal ini diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi

### 2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atas pemberian amanah

---

<sup>12</sup> Mohammad Fahmi Ikhwanda, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat*, 2018

Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki sense of accountability.<sup>13</sup>

Menurut Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada [ihak pemberi amanah yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>14</sup>

Indikator akuntabilitas antara lain sebagai berikut:

1. Metode penyusunan ketetapan secara tertulis.
2. Ketepatan dari kelengkapan informasi.
3. Keputusan dari tujuan kebijakan yang ditetapkan.
4. Penyebarluasan informasi tentang suatu keputusan.<sup>15</sup>

#### **E. Kepercayaan Donatur**

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa seseorang bisa menemukan apa yang menjadi keinginannya pada mitra tertentu. Kepercayaan yaitu keyakinan dari seluruh pihak terhadap satu orang atau lebih yang bisa dipercaya untuk melengkapi kewajiban dari hubungan timbal balik.<sup>16</sup> Kepercayaan adalah pihak yang memiliki keyakinan terhadap pihak lain dan masih terlibat dalam pertukaran dan memiliki reliabilitas dan

---

<sup>13</sup> Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 40

<sup>14</sup> Mardiasmo, *akuntansi sektor publik*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009) 78

<sup>15</sup> Loina Laolo Krina, *Indikator Dan Prinsip Alat Ukur Akuntabilitas Transparansi Dan Partisipasi* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), 11-12.

<sup>16</sup> I Luh Aqnez Sylvia, *Servant Leadership* (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2021), 84.

kepercayaan atau integritas.<sup>17</sup> Kepercayaan merupakan keinginan untuk bergantung pada mitra atau rekan.<sup>18</sup> Adapun Fungsi dan tujuan kepercayaan yaitu menjaga hubungan, mengurangi pengawasan, memberi informasi yang positif, menerima risiko, memberikan kenyamanan dan kepuasan.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Muzakki merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan perintah wajib zakat. Kesadaran muzakki untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaannya adalah hal yang perlu serius diberi perhatian oleh lembaga pengelola zakat. Banyaknya muzakki yang dapat dihimpun dalam suatu lembaga menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja suatu lembaga pengelola zakat dan itu terbangun atas dasar kepercayaan.

Kepercayaan muzakki merupakan aspek yang vital dalam sistem pengelolaan zakat. Tindakan muzakki dalam membayar zakat, sangat bergantung kepada kepercayaan mereka kepada lembaga zakat. Kepercayaan menjadi hal yang di junjung tinggi dalam menilai hubungan muzakki dengan para pengelola ZIS. Kepercayaan menjadi harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian. Ada 11 kondisi yang dapat menyebabkan kepercayaan itu ada, yaitu: keleluasan, ketersediaan, kompetensi, konsistensi,

---

<sup>17</sup> Li Darsono, B S Dharmmesta, "Kontribusi Involment dan Kepercayaan dalam Membangun Loyalitas Pelanggan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 20, No 3, (2005), 287

<sup>18</sup> Moorman dkk, "Factors Affective Trust in Market Research Relationship", *Journal Marketing Research*, Vol. 57, (Januari-1993), 82.

<sup>19</sup> Muhammad, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPF, 2005), 205.



pelaku adil, integritas, loyalitas, keterbukaan, kepercayaan secara keseluruhan, janji akan pemenuhan kebutuhan, dan penerimaan.<sup>20</sup>

Menurut Moorman, Deshpande dan Zaltman mengartikan kepercayaan sebagai kemauan seseorang individu untuk bergabung pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran.<sup>21</sup> Menurut Garbarino dan Johnson kepercayaan dalam pemasaran jasa lebih menekankan pada sikap individu yang mengacu pada keyakinan konsumen atas kualitas dan keterandalan jasa yang diterimanya.<sup>22</sup>

Berikut ini merupakan indikator kepercayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Performa sesuai harapan.
- 2) Kepercayaan dilakukan pekerjaan sesuai dengan standar.
- 3) Kepercayaan bisa bekerja dengan baik.
- 4) Kepercayaan melakukan pelayanan yang benar.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2018), 45.

<sup>21</sup> Moorman, Deshpande dan Zaltman, *Factors Affecting Trust In Market Research Relationship*, *Journal Marketing Research*, Vol 57, 1993 81-101

<sup>22</sup> Garbarino, Ellen, Mrk S Johnson, *The Different Roles Off Satisfaction, and commitment in Customer Relantionship*, *Journal Of Marketing*, Vol. 63, 1999

<sup>23</sup> Mulyo Budi Setiawan, "Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan, dan Komitmen Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada BPR Bank Pasar Kendal)", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, No. 2, Vol. 14, (September, 2007), 217